

ANTISIPASI BENCANA DAMPAK LA NINA

Perhitungkan Sektor Pertanian-Perhubungan

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran-nya untuk menyiapkan dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi dan juga dampak dari La Nina, terhadap berbagai sektor di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai antisipasi bencana hidrometeorologi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10).

"Dampak dari La Nina ini terhadap produksi pertanian, agar betul-betul dihitung, (serta) terhadap sektor perikanan dan juga sektor perhubungan," kata Presiden.

Presiden menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena La Nina diprediksi akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi 20-40 persen di atas normal jumlah curah hujan bulanan di Indonesia. "(Peningkatan curah hujan) 20-40 persen bukan kenaikan yang kecil," tegas Presiden.

Ia juga memerintahkan kepada peserta Ratas, agar informasi mengenai

perkembangan cuaca disampaikan secepatnya kepada seluruh provinsi dan daerah.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan, BMKG telah memperkirakan perlunya kewaspadaan tinggi untuk mengantisipasi bencana alam karena puncak fenomena La Nina di Indonesia akan terjadi di Desember 2020-Januari 2021, yang berbarengan dengan musim hujan di Januari-Februari 2021.

"La Nina puncaknya Desember 2020, sehingga kita perlu mewaspadai puncak La Nina dan musim hujan dalam kisaran Desember-Januari-Februari," kata Dwikorita Karnawati.

Meskipun puncaknya baru terjadi Desember 2020, kata Dwikorita, namun La Nina yang mengakibatkan curah hujan tinggi itu sudah terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia pada Oktober 2020 ini.

La Nina merupakan fenomena alam yang terjadi karena meningkatnya suhu permukaan Samudera Pasifik Timur dan tengah, kemudian menyebabkan peningkatan suhu kelembapan pada Atmosfer di atas perairan. Hal itu mengakibatkan pembentukan awan dan meningkatkan curah hujan di kawasan tersebut.

BMKG memperkirakan dampak La Nina di Oktober 2020 akan menyerpa hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali Sumatera dan Papua bagian Timur. Namun meskipun tanpa La Nina, Sumatera sudah mengalami curah hujan tinggi karena kondisi topografi lokal.

"Jadi kesimpulannya mulai Oktober-November 2020 seluruh wilayah Indonesia perlu diwaspadai. Bagaimana Desember? La Nina itu semakin menguat," kata Dwikorita.

Kepala Pusat Meterologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengingatkan para nelayan agar mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang tinggi, terutama di Laut Selatan-Barat Sumatera hingga Selatan Nusa Tenggara. (Sim/Imd/Ati)-d



KR-Antri Yudiandiyah
Perwakilan klub Liga 1 2020 dan PT LIB memperlihatkan surat pernyataan yang telah ditandatangani 18 klub peserta.

18 TIM PESERTA BERSEPAKAT

Liga 1 2020 Tetap Lanjut

SLEMAN (KR) - Sebanyak 18 tim peserta Liga 1 2020 sepakat kompetisi kasta teratas sepakbola tanah air tersebut tetap lanjut. Paling cepat, kompetisi ini dimulai 1 November mendatang. Hal tersebut menjadi keputusan utama saat tim-tim peserta Liga 1 2020 menghadiri rapat bersama PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator liga dan PSSI di Kasultanan Ballroom Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (13/10).

Dalam pernyataan sikap klub Liga 1 yang dibacakan Firman Achmadi, General Manager Borneo FC, klub Liga 1 mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Presiden RI yang telah mendukung percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. "Klub sepakat kompetisi ini dilanjutkan dengan tujuan kepentingan Timnas kedepan agar bisa bersaing di perhelatan Piala Dunia U-20 tahun 2021," katanya.

Selain itu, bergulirnya kompetisi dipercaya dapat menghidupkan sektor ekonomi, antara lain Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19. "Klub sepakat dilanjutkannya kompetisi pada 1 November 2020 dengan semangat memajukan sepakbola nasional," tegas Firman Achmadi.

Ia menambahkan, tiga alternatif telah

disusun untuk kelanjutan Liga 1 2020. Pertama, kompetisi dimulai kembali 1 November dan poin di laga sebelumnya tetap dihitung. Kedua, jika Liga 1 2020 lanjut Desember, format kompetisi diubah menjadi dua wilayah. Ketiga, jika Liga 1 2020 baru dapat dilaksanakan Januari, tim akan menerima konsekuensi bila pertandingan tetap dilaksanakan pada bulan Ramadan," tambah Firman.

Sementara itu, Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita akan menyiapkan segala hal, termasuk jadwal. Sejauh ini PSSI telah melakukan koordinasi dengan unsur keamanan, yakni kepolisian. Jika izin diberikan, kompetisi dilanjutkan.

"Ketua Umum PSSI berusaha sebisa mungkin izin pertandingan bisa didapatkan," kata Akhmad Hadian Lukita.

PT LIB pun telah menyiapkan tim khusus untuk memastikan protokol kesehatan dapat dijalankan dengan ketat oleh semua tim peserta Liga 1 2020. Termasuk mengharuskan pemain, pelatih, official, panpel pertandingan serta semua yang bersentuhan dengan pemain untuk menjalani *swab test* sekali dalam 14 hari. "Kami sudah membentuk tim, siapa yang bertanggung jawab akan isolasi jika ada pemain yang positif Covid-19, rumah sakit rujukan siap. Kami juga sudah menyiapkan dokter," ujar Direktur Operasional PT LIB. (Yud)-d

Menyasar

"Sinovac, kita sudah punya schedule detail pengadaan 143 juta (dosis) dan seluruhnya awalnya akan bekerja sama dengan Bio Farma. Dengan Sinopharm, di tahun 2020 ini sekitar 15 juta (dosis). Kemudian juga dengan Cansino menjanjikan kita sekitar 100.000 (dosis) di akhir Desember dan tahun depan sebesar 15 juta (dosis)," ujar Menko Perekonomian.

Ditambahkan Airlangga, saat ini Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN juga sedang melakukan negosiasi final dengan AstraZeneca untuk pengadaan 100 juta dosis vaksin.

Secara terpisah, Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala

BNPB Doni Monardo menyatakan, tidak ada tempat aman dari pandemi Covid 19.

Sudah 32 provinsi dan 500 kabupaten/kota yang terinfeksi Covid-19, sehingga masyarakat harus disiplin terhadap protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Cegah kegiatan yang sifatnya kerumunan, kegiatan berkerumun pasti akan menimbulkan penularan karena dalam suasana pandemi nyaris tidak ada lagi tempat yang betul-betul steril dari ancaman Covid-19," kata Doni.

Ia berharap 15 kabupaten/kota yang hingga saat ini tercatat sebagai zona hijau belum terdampak Covid-19 tetap aman terjaga. "Walaupun masih terda-

pat kabupaten/kota di Tanah Air yang belum tersentuh Covid-19 tetapi kalau ini tidak dijaga dengan sungguh-sungguh maka dengan mudah Covid-19 akan menyerang, kita tidak boleh lengah," ucapnya.

Dilansir dari laman Covid19.go.id, ke-15 kabupaten/kota yang belum terdampak tersebut antara lain Pegunungan Arfak, Yahukimo, Dogiyai, Deiyai, Mamberamo Raya, Nduga, Asmat, Puncak, Intan Jaya, dan Ngada.

Sementara zona merah masih berjumlah 54 kabupaten/kota, zona oranye 307 kabupaten/kota, zona kuning 121 kabupaten/kota, dan zona hijau tidak ada kasus baru 17 kabupaten/kota. (Sim/Ati)-f

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

Utak-atik

itu pun mengundang pertanyaan banyak kalangan.

Pihak DPR RI, Selasa (13/10) mengumumkan draf final UU Ciptaker berjumlah 812 halaman. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR Jakarta. Ia menjelaskan perubahan jumlah halaman dari semula 1.035 disebabkan dari mekanisme pengetikan, perubahan kualitas serta ukuran dan jenis kertas yang digunakan

Penjelasan Azis Syamsuddin dan Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas itu untuk menjawab simpang siur yang terjadi mengenai jumlah halaman UU Ciptaker yang sebenarnya.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan, UU Ciptaker yang resmi hanya berisi 488 halaman. Namun, apabila ditambah dengan jumlah halaman penjelasan UU Omnibus Law tersebut, totalnya menjadi 812 halaman. Azis menambahkan, pada saat pembahasan di Panitia Kerja RUU Ciptaker, margin kertas masih ukuran biasa (A4).

Kemudian, ketika draf dibawa ke Sekjen DPR, ketentuan margin harus mengikuti standar yang disepakati UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka margin kertas diganti menjadi ukuran legal. Itulah mengapa pernyataan Sekjen DPR Indra Iskandar, yang dikutip media massa mengatakan, UU Ciptaker berisi 1.035 halaman.

"Setelah pengetikan, dalam arti

editing, mengikuti panduan legal oleh Sekjen dan jajaran, jumlahnya 812 halaman, termasuk di dalamnya adalah penjelasan UU Ciptaker. UU secara resmi hanya 488 halaman," kata Azis.

Di luar kisruh jumlah halaman UU Ciptaker di DPR, aksi penolakan UU tersebut, kemarin masih terus merebak. Berbagai elemen masyarakat terus menyuarakan agar UU Ciptaker dibatalkan. Kemarin yang turut berunjukrasa adalah Anak NKRI dan Front Pembela Islam (FPI) yang berjumlah 4.000 massa. Pada pukul 16.00 mereka sudah membubarkan diri dengan tertib.

Namun, justru setelah itu ada masa aksi lain yang melakukan tindakan anarkis dengan melempari batu ke arah polisi. Sedikitnya 500 orang ditangkap karena melakukan kerusuhan. Hal ini, juga dibenarkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana. Massa yang datang setelah pukul 16.00 WIB itu melakukan aksi di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha atau Bundaran BI. Mereka didominasi remaja. "Mereka berupaya provokasi. Awalnya kami bertahan agar tidak terpancing, namun mereka melemparkan benda-benda keras, kami lakukan pendorongan dan penangkapan," ujar Kapolda.

Tembakan gas air mata sempat mewarnai aksi unjukrasa di Jalan Ikhlas Kota Magelang, kemarin. Massa kemudian berlarian untuk meninggalkan lokasi, bahkan ada yang sempat masuk ke kawasan pemukiman warga dan melompati pa-

gar Kantor Cabang Bank BRI Magelang.

Kapolres Magelang Kota AKBP Nugroho Ari Setyawan mengatakan, massa lokasi tersebut sekitar 100 dan dibawa ke Polres Magelang Kota. Kapolres membenarkan diantara mereka ada yang tercium bau minuman keras. Selain mahasiswa, diantara peserta demo juga terdapat sejumlah pelajar. Supaya mereka tidak menjadi korban manakala terjadi aksi anarkis, para pelajar ini diselamatkan terlebih dahulu di Polres Magelang Kota.

Ketua Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Daerah Istimewa Yogyakarta (Pengda Kagama DIY), Gatot Saptadi, mendukung sikap Rektor UGM Prof Panut Mulyono yang melarang mahasiswanya melakukan unjukrasa. Penyampaian aspirasi tidak harus dengan turun ke jalan, tetapi bisa melalui rektorat atau lainnya.

"Kalau berdemo, apalagi dalam jumlah massa besar, rawan disusupi provokator dan bisa sulit dikendalikan. Saya sangat menyayangkan aksi rusuh yang terjadi beberapa waktu lalu. Kita sudah 75 tahun merdeka kok caranya berdemokrasi masih sangat memprihatinkan seperti itu," kata Gatot Saptadi mengomentari pemberitaan KR, Selasa (13/10).

Dijelaskan, demo memang tidak dilarang. Tetapi ada aturannya, misalnya harus izin dengan menjelaskan waktunya, juga jumlah pesertanya. Mestinya juga dilakukan dengan tertib, sopan dan tidak melakukan perusakan. (Ati/Tha/Fie/Lim)-f

Sambungan hal 1

Pasal

Meski irasional dan sulit dipercaya bagi kaum terpelajar, event pemilu sekalipun pun, pasti membutuhkan jasa paranormal. Konon, keberadaan timsus paranormal adalah hal yang normal dibutuhkan dalam setiap tahun pilkada. Legalitas praktik perdukunan dalam UU, seolah mendegradasi profesi keahlian dokter atau tenaga medis lainnya. UU Kesehatan mensyaratkan, untuk mendapat predikat dokter spesialis, diwajibkan menempuh pendidikan formal secara berjenjang dengan biaya dan pengorbanan waktu yang cukup panjang.

Meskipun tidak perlu membuka praktik formal, jasa dukun bayi sangatlah besar dalam membantu mengurangi angka mortalitas atau proses kelahiran, terlebih bagi masyarakat kurang mampu. Paranormal medis tidak perlu kuliah sampai di ibukota. Ijazah S3 apalagi gelar spesialis bukanlah hal yang lazim bagi mereka. Namun kehadirannya, tetapih pahlawan bagi masyarakat kecil yang memerlukan pertolongan. Jasanya sangat

ngat dibutuhkan di berbagai pelosok pedesaan yang minim infrastruktur medis dan tenaga kesehatan.

Dalam konteks *access to justice*, janganakan rumah sakit, puskesmas atau posyandu dengan sejumlah faskes masih menjadi mimpi bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Termasuk warga miskin perkotaan.

Polemik ini harus dibjaki bahwa, akses keadilan kesehatan bagi warga miskin wajib diprioritaskan. Ironisnya, alih-alih pengurangan sejumlah item anggaran kementerian dan OPD dan di realokasi untuk pandemi, pemerintah malah mengurangi anggaran kesehatan pada AP-BN 2021. Sedangkan, anggaran infrastruktur justru mengalami kenaikan signifikan.

Pemerintah bahkan, mengajukan anggaran infrastruktur jauh lebih besar ke DPR yakni Rp 419 triliun. Walhasil, anggaran infrastruktur, naik dari angka Rp 281,1 triliun menjadi Rp 414 triliun di tahun depan. Di sisi lain, anggaran kese-

hatan dipangkas, dari angka Rp 212,5 triliun (2020) menjadi Rp 169,7 triliun di tahun 2021.

Terlepas dari pro kontra, jasa pengobatan alternatif dalam menyelamatkan ribuan nyawa tanpa pamrih adalah misi kemanusiaan yang patut diapresiasi, layaknya jiwa korps profesi dokter. Jika klausul pasal dunksi dianggap tidak tepat masuk dalam undang-undang, maka tugas negara adalah bagaimana caranya, melahirkan kebijakan yang turut memperhatikan keberadaan pengobatan alternatif medis tersebut.

Aspek badan hukum, kelayakan, legalitas perizinan, atau visi pengobatan serta sanksi bagi yang menyimpang, idealnya dipikirkan secara legal-yuridis. Mungkin saja, digolongkan sebagai tenaga volunteer atau relawan paramedic. Yang menjadi garda terdepan, memberikan pertolongan darurat bagi masyarakat yang membutuhkan. (Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)-d

Desa Wisata Pionir Kebangkitan Pariwisata

YOGYA (KR) - Dengan

potensi yang dimiliki, desa wisata bisa menjadi pionir kebangkitan pariwisata di masa pandemi Covid-19. Jelang Adaptasi Kebiasaan Baru. Alam pedesaan (rural) Indonesia yang alami (back to nature, eco tourism) menjadi bayangan wisatawan mancanegara yang harus ditanggap desa wisata dengan dukungan stakeholder (pemerintah daerah), perguruan tinggi (akademisi), industri pariwisata (tour travel), komunitas (gowes dan lain-lain), dan media massa.

"Tentunya dengan penerapan CHSE (Cleanliness/Kebersihan, Health/Kesehatan, Safety/Keamanan), dan Environment/Ramah lingkungan) dalam SOP Covid-19 yang diterapkan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," tutur Dosen Fisipol, pakar pedesaan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Dr Desideria Murti SSos MA saat Bincang-bincang Editorial dengan Redaktur Pelaksana KR, Primaswolo Sudjono, Selasa (13/10) yang disiarkan juga di Channel YouTube Kedaulatan Rakyat TV.

Desi menyebutkan awal



KR-Juvintarto
Dr Desideria Murti SSos MA

pandemi Covid-19 sempat memukul desa wisata yang hanya mengandalkan single income.

"Yang mampu bertahan dan cepat adaptasi adalah desa wisata yang multi diversifikasi, memiliki usaha lain dan desa wisata yang punya kecepatan pemahaman teknologi informasi dengan menguasai sosial media, mereka bisa cepat bergerak, misalnya dengan jualan/promosi online," ucap Desi.

Menurut Desi Desa Wisata yang mengandalkan outbond dari siswa/anak sekolah seperti di Kulonprogo harus memastikan penerapan CHSE dan belum bisa dibuka, apalagi sekolah diliburkan. "Namun desa wisata Nglanggeran yang

dulu muncul karena ada bencana justru ulet dan cepat beradaptasi dengan virtual tour, webinar," terang Desi.

Namun demikian, Desi berharap warga desa wisata supaya tidak "gumunan" dengan wisatawan mancanegara seperti kondisi di Bali. "Touris akan terkesan dengan suasana alam Indonesia didukung keramahan warga desa wisata," ucap Desi.

Dalam kondisi saat ini industri pariwisata seperti tour & travel bisa mendukung kemajuan desa wisata dengan turut memberi pelatihan pengembangan desa wisata. "Bangkitnya desa wisata jelang AKB juga akan menggerakkan kebangkitan industri pariwisata lainnya. Apalagi bila kita lihat brosur tentang Indonesia di luar negeri menggambarkan suasana desa seperti sawah, ritual dan spiritual di desa yang sangat menarik minat wisman," tegasnya.

Jadi menurut Desi tidak salah bila pemerintah fokus untuk pengembangan desa. "Fokus sudah tidak lagi di kota, tapi desa," ujarnya.

(R-4)-d

Kesehatan

Sementara bidang olahraga saat ini makin lesu.

"Olahraga saat ini memprihatinkan. Padahal olahraga bisa jadi kebanggaan masyarakat, tapi sekarang lesu. Dari sisi kebudayaan, Dana Keistimewaan juga sangat kecil di Bantul hanya mendapatkan alokasi Rp 20 miliar," jelasnya seraya menambahkan kenaikan angka kemiskinan di Bantul sekarang menjadi 17 persen.

Sementara AHM menambahkan respons publik Bantul atas keberadaan paslon AHM-JP sangat positif. Bahkan relawan-relawan rela mencetak sendiri banner kaos dengan biaya sendiri. "Kami optimis menang dalam Pilkada besok. Kami juga berterimakasih kepada KR telah mendukung elektabilitas kami

dengan pemberitaan-pemberitaan positif dan tidak memihak," jelasnya.

Pemred SKH KR, Drs

Sambungan hal 1

Octo Lampito, berharap siapapun yang menang dalam Pilkada nanti tidak melupakan janji-janjinya. (Aje)-d



Prakiraan Cuaca Rabu, 14 Oktober 2020					
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu C	Kelembaban
Bantul				24-31	60-95
Sleman				23-30	65-95
Wates				24-31	60-95
Wonosari				24-31	60-95
Yogyakarta				24-30	65-95